

**IMPLIKASI KEBIJAKAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN
BEBAS (*FREE TRADE ZONE*) TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA CUKAI DI WILAYAH HUKUM KOTA
TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Disusun Oleh:

**Nama : IRWANDI SYAHPUTRA
No BP: 1620112003**

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., MH**
- 2. Dr. Siska Elvandari, S.H., MH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

ABSTRAK

PP. No. 47 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan PP No 41 Tahun 2017 menetapkan KPBPB Bintang meliputi sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Dengan menempatkan sebagian wilayah Kota Tanjungpinang maka akan berpengaruh terhadap pengawasan teknis peredaran barang kena cukai yang peruntukannya untuk kawasan bebas. keterkaitan penegakan hukum tindak pidana cukai dengan *Free Trade Zone* dalam kasus peredaran barang kena cukai tanpa pita dan pelunasan cukai belum ada yang sampai proses peradilan. berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau; (2) Bagaimana implikasi kebijakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) terhadap penegakan hukum tindak pidana cukai di wilayah hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis Sosiologis*. Sifat penelitian deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan; **pertama**, Penegakan hukum oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B dilakukan dalam dua bentuk yaitu penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) seperti pembinaan dan penyuluhan hukum, pengamatan oleh tim intelijen dan patroli sedangkan bersifat represif (penindakan) seperti melakukan penangkapan, penyitaan atau penegahan serta operasi pasar. setiap kasus belum ada di proses ke pengadilan karena para pelaku yang ditangkap masih dalam golongan kecil, fokus kinerja lebih kepada kepentingan pendapatan Negara (Fiskal) dan sanksi pidana bersifat Ultimum Remedium sehingga sanksi tindakan seperti penegahan dengan status barang dimusnahkan diterapkan terlebih dahulu. Penegakan hukum tindak pidana cukai belum berjalan sesuai sistem peradilan pidana sehingga penegakan hukum ini masih bersifat pengendalian untuk mengurangi peredaran. **kedua**, kebijakan *Free Trade Zone* Bintang Wilayah Kota Tanjungpinang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana cukai karena secara teknis akan sulit mengawasi peredaran BKC khusus kawasan bebas, sehingga berdampak terhadap sulitnya dilakukan penegakan hukum. Secara rinci faktor-faktor tersebut antara lain yaitu menempatkan sebagian wilayah Kota Tanjungpinang sebagai Kawasan Bebas Bintang (*Enclave*), perbandingan kuota BKC dengan jumlah penduduk kawasan bebas dan relevansinya dengan kebutuhan wajar dan belum adanya pelabuhan khusus tempat pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas serta Pos Penjagaan khusus untuk mengawasi batas-batas zona kawasan bebas dengan daerah lain dalam pabean

Kata Kunci : Kawasan Bebas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cukai

ABSTRACT

PP. No. 47 Year 2007 as has been updated with Government Regulation No. 41 of 2017 establishing Free Trade Zone and Bintan Free Port covering part of Tanjungpinang City area covering Industrial Area Senggarang and Industrial Land Dompok Land. By placing part of Tanjungpinang City, it will affect the technical supervision of the circulation of goods subject to excise duty for the free area. the linkage of law enforcement with the Free Trade Zone in the case of circulation of goods subject to excise duty without ribbon and the payment of excise duty has not been until the judicial process. based on this matter can be formulated problem in this research: (1) How law enforcement of excise crime in jurisdiction of Tanjungpinang City Province of Kepulauan Riau; (2) What is the implication of the policy of free trade zone and Free Trade Zone to the law enforcement of excise in Tanjungpinang Municipality of Kepulauan Riau Province. The method used in this research is the Juridical Sociological method. The nature of descriptive research with primary and secondary data sources. Based on this research can be concluded; Firstly, law enforcement by KPPBC Type Madya Custom B is done in two forms: preventive law enforcement such as counseling and legal counseling, observation by intelligence and patrol team while repressive, such as arrest, seizure or prevention and operation market. each case is not yet in court because the perpetrators are still in the minor category, the focus of performance is more on the interest of State income (Fiscal) and the criminal sanction is Ultimum Remedium so that action sanction such as prevention with the demolished goods status is applied first. Law enforcement of excise crime has not been run according to criminal justice system so that law enforcement is still controlling to reduce circulation. secondly, the policy of Free Trade Zone Bintan Tanjungpinang City Area influence to law enforcement of excise because technically it will be difficult to supervise the circulation of excisable goods of special free area, so that impact to the difficulty of law enforcement. In detail these factors include placing a part of Tanjungpinang City as an Enclave Free Area, comparing quota of Excisable Goods with the number of free area residents and its relevance to the normal needs and the absence of a special port of entry and disposal of goods to and from Free Zones and Special Guard Post to supervise the boundaries of free zones with other areas of customs.

Keywords: Free Trade Zone, Law Enforcement, Customs Crime